

REINTEGRASI ETNO-NASIONALISME SEPARATIS PADA NASIONALISME INDONESIA RAYA: STUDI ETNO-NASIONALISME ACEH PASCA DAMAI

*Reintegration of Separatist Ethno-Nationalism on Nationalism of Indonesia Raya:
Study of Ethno-Nationalism in Post-Peace of Aceh*

Zulham

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh
Email: zulhambere@gmail.com

Abstract

*This paper discusses the models and challenges of Indonesian nationalism. The approach used is the historical approach. Ethno-nationalism is regarded as an unexpected latent threat to the modern state, especially Indonesia archipelagic comprising various ethnic. The purpose of this paper is to analyze the factors driving Aceh's ethno-nationalism to the disintegration of the nation and how the reintegration of Aceh's ethno-nationalism after peace which ends the long-running conflict between RI and GAM. The theories and concepts used in here are ethno nationalism, nationalism, sovereignty. The method used is library research, by content analysis and using discourse instruments. Furthermore the data is analyzed descriptive with the results are: The Indonesian political elite regulates Indonesia as a country with no local wisdom. Ethno-cultural should be removed. Ethnic differences must be transformed into Indonesia Raya. The next result is RI can accommodate the differences in Aceh, by making regional ethno-nationalism an inspirational *kebenikaan*, thus, regional nationalist ethnic will be integrated, this is a positive impact of the participation of central government protection over Acehnese. This has been done by the Government of Indonesia in the form of its MoU with the Acehnese, has bridged the difference between RI and Aceh through the formation of the Local Party and others. It is an embryo to revive the sense of belonging to Acehnese through local democracy built by the Jakarta, so the goal of Aceh for independence has reverted to the reintegration of Indonesia as a whole.*

Keywords: Reintegration, Ethno-Nationalism, Separatism, Nationalism, Aceh Peace

Abstrak

Tulisan ini membahas model dan tantangan nasionalisme Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman laten yang tak terduga bagi negara modern, khususnya Indonesia negara kepulauan terdiri berbagai wilayah etnis. Tujuan paper ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong etno-nasionalisme Aceh kepada disintegrasi bangsa dan tujuan selanjutnya bagaimana reintegrasi etno-nasionalisme Aceh pada nasionalisme Indonesia Raya pasca perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Adapun teori dan konsep yang

digunakan dalam tulisan ini adalah etno nasionalisme, nasionalisme, kedaulatan. Metode yang dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), dengan analisis kandungan (*content analysis*) dan menggunakan instrumen wacana (*discourse*). Selanjutnya data dialisis secara dekriptif dengan hasil kajian sebagai berikut: Elit politik Indonesia mengatur Indonesia sebagai negara yang tidak berkearifan lokal. Keanekaragaman etno-budaya harus dihapus. Perbedaan etnis harus diubah menjadi Indonesia yang baru dibentuk (Indonesia Raya). Hasil berikutnya adalah pemerintah dapat mengakomodir perbedaan Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme daerah sebagai kebenaran yang inspiratif, sehingga etnis nasionalis daerah akan terintegrasi seiring berjalannya waktu, ini merupakan imbas positif dari pada keikutsertaan pengayoman pemerintah pusat terhadap etnis-nasionalisme Aceh tersebut. Bentuk usaha akomodir ini telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam bentuk memorandum of understanding-nya dengan warga Aceh, telah menjembatani perbedaan nasionalisme antara RI dan Aceh melalui formasi Partai Lokal dan lainnya. Ini merupakan embrio meghidupkan kembali rasa memiliki ke-Indonesiaan Aceh melalui demokrasi lokal yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini, tujuan Aceh untuk merdeka berbalik arah kepada reintegrasi Aceh terhadap Indonesia seutuhnya.

Kata Kunci: Reintegrasi, Etno-Nasionalisme, Separatis, Nasionalisme, Aceh Damai.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir terjadi ketegangan besar antara nasionalisme kewarganegaraan dan etno-nasionalisme yang mengakibatkan adanya multikulturalisme, yang menekankan bahwa bangsa ini diliputi oleh masyarakat multi-etnis dan juga negara menjamin status setara mereka (Brown, 2001:2). Dalam konteks sejarah Indonesia, Negara masih luput dalam mengakomodir kebenaran multi-etnis daerah serta masih kurangnya perhatian terhadap alokasi dan distribusi status sosial keberagamannya. Ada kecenderungan Negara mempolitikasi kebinekaan daerah. Politisasi etnis dan nasionalisme bisa berarti dampak politik terhadap etnisitas dan identitas nasional. Hal ini pada gilirannya dapat menandakan penggunaan etnis dan nasionalisme dalam perebutan kekuasaan para pemimpin dan partai, yang mengarah ke analisis mikro politik etnik: atau proses dimana negara menciptakan kelompok dan negara etnis dan konflik mereka, menghasilkan analisis makro Formasi nasional (Smith, 1996:445-46).

Etno-nasionalisme mengacu pada nasionalisme yang didasarkan pada keunikan manusia, dan oleh karena itu, menyiratkan bentuk kewarganegaraan eksklusif berdasarkan anggota yang memiliki identitas etnis yang sama (Bertrand, 2002:3-4). Etno-nasionalisme dapat juga disebut sebagai nasionalisme budaya yang menekankan bangsa sebagai masyarakat (etno) kesamaan budaya (Brown, 2001:2).

Nasionalisme kebangsaan tumbuh dari prinsip revolusi Prancis dan Amerika, yang menekankan bentuk kewarganegaraan inklusif berdasarkan kedaulatan rakyat sebagai individu bebas. Bentuk nasionalisme ini memiliki prinsip dasar yang sama seperti demokrasi karena menekankan kesetaraan dan kebebasan individu (Bertrand, 2002:3). Selain itu, Kellas mengatakan nasionalisme kewarganegaraan dibagi menjadi sub-perpecahan, nasionalisme sosial dan nasionalisme resmi. Sementara nasionalisme sosial adalah sebuah negara yang mendefinisikan dirinya dengan ikatan sosial dan budaya daripada oleh kesamaan di mana nasionalisme resmi adalah nasionalisme negara, yang mencakup semua yang secara hukum berhak menjadi warga negara, terlepas dari etnisitas, identitas dan budaya nasional mereka (dalam Lawfield, 2009:4). Dengan kata lain, nasionalisme warga negara menekankan bangsa sebagai masyarakat warga negara yang setara (Brown, 2001:2). Dengan demikian, kewarganegaraan ini, dan bukannya keanggotaan melalui keturunan, memungkinkan nasionalisme yang lebih inklusif antara masyarakat dengan warga negara yang sama, memiliki hak, keterikatan patriotik yang utuh terhadap seperangkat praktik dan nilai politik bersama (dalam Lawfield, 2009:4).

Ras dan etnis menjadi dominan hanya dengan munculnya nasionalisme modern. Misalnya, Kekaisaran Ottoman adalah kerajaan multi-rasial multi-etnis yang hanya memiliki perbedaan agama, Muslim, Kristen, atau Yahudi. Nasionalisme mengubah ini (Savich, 11). Nasionalisme etnik lebih mengacu pada masa lalu, ke alam leluhur dan (melalui sejarah bersama). Dalam komunitas seperti itu, karena menuntut keturunan bersama, dan kewarganegaraan tertutup hanya diakuisisi oleh darah dan 'ritus' kelahiran sesuai dengan hukum 'ius sanguinis' (Lawfield, 2009:5). Menurut primordialis dan perennialist, etnisitas cenderung berasumsi bahwa etnik primordial, memberi kondisi manusiawi, dan bahwa negara-negara itu historis namun purbakala. Negara, partai, birokrasi dan politik sebagian besar dianggap sebagai ekspresi publik dari perbedaan etnis dan identitas budaya yang sudah ada sebelumnya (Smith, 1996:446).

Dalam teori konflik etnis, kriteria etnis adalah sumber pertengkaran yang menonjol di antara masyarakat. Hubungan historis dan linguistik yang khas dianggap sebagai titik referensi utama bagi individu. Ketika pola hubungan sosial antara kedua kelompok etika sedemikian rupa sehingga ketegangan sosial dan hasil konflik, tuntutan untuk memperluas pengaruh kelompok etnis dihasilkan (Hah & Martin, 1975:374). Konflik Israel-Palestina dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah bersama dan

kenangan sejarah yang umum dapat menjadi pemecah belah dan bukan pemersatu. Tinggal bersama di wilayah yang sama dan di bawah pemerintahan yang sama, atau bahkan berbagi sistem ekonomi dan hukum, mungkin gagal memadukan beragam komunitas menjadi satu negara, sebagaimana dibuktikan oleh realitas politik di Kanada, Belgia, bekas Yugoslavia, dan Ceko-Slowakia (Tamir, 1995:424-25). Dalam konteks nasionalisme, premis dasar teori konflik adalah bahwa persaingan antar kelompok menimbulkan tuntutan untuk mengendalikan sistem distributif (Hah & Martin, 1975:369).

Nasionalisme masih merupakan dorongan politik yang kuat. Kasus negara-negara bekas konflik etnis seperti Yugoslavia adalah contoh nasionalisme baru-baru ini yang menyebabkan konflik kekerasan tentang kedaulatan (Hjerm,1). Selain trauma tertentu dari keruntuhan negara dalam kasus Soviet dan Yugoslavia mungkin telah berkontribusi pada peningkatan baru-baru ini dalam insiden kekerasan etnis dan nasionalis dalam semua kekerasan politik, yaitu apa yang mungkin disebut etnisasi kekerasan politik (Brubaker&Laitin, 1998:424).

Demikian pula kasus di Indonesia, provinsi Aceh, di mana budaya dan etnis khas Aceh, dan juga bahasa, telah menekankan kembali bahwa ini adalah wilayah pra-kolonial sebelum diintegrasikan ke dalam kedaulatan Indonesia dan pada saat bersamaan penduduk Aceh melawan nasionalisme nasional Indonesia. Dengan demikian, gerakan etno-nasionalis merupakan tantangan berat bagi demokrasi. Kelompok-kelompok yang dimobilisasi di sepanjang garis etnik mengikuti sebuah negara dan merupakan institusi politik. Mereka berharap untuk mengenali batas-batas dan membuat sebuah negara baru di mana mereka mewakili mayoritas (Bertrand, 2002:2).

Masyarakat Aceh sejauh ini adalah contoh Indonesia yang sesuai. Selain konflik etno-nasionalisme, ada empat kategori konflik, seperti persaingan komunal, yang merujuk secara langsung tersebar melalui wilayah tersebut dalam masyarakat majemuk, dan bersaing dengan kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan bagian kekuasaan politik. Misalnya konflik antara Muslim dan Kristen di Ambon atau Poso; Konflik kelas etno yang mengacu pada kehidupan yang tersebar melalui wilayah dalam masyarakat majemuk, dan menginginkan partisipasi yang lebih besar di negara untuk mencapai persamaan hak dan kesempatan untuk mengatasi dampak diskriminasi akibat

status imigran dan minoritas mereka. Contohnya adalah bahasa Tionghoa Indonesia; Penduduk asli ingin tinggal di wilayah yang ditentukan dan menginginkan otonomi lebih besar dari negara yang mengaturnya, terutama terkait untuk melindungi tanah tradisional, sumber daya, dan budaya mereka. Aceh, masyarakat Dayak di Kalimantan dan juga masyarakat Papua adalah contoh nyata dari konflik ini; Yang terakhir adalah sekte militan (agama) yang mengacu pada kelompok kecil yang biasanya hanya memperjuangkan ideologi religius (Klinken, 2003:112-13).

Berdasarkan kepentingan di atas, di masa lalu, hampir semua negara bangsa memutuskan bahwa ini adalah wilayah nasional dengan paksa, didukung oleh hak mutlak negara dan elit spekulasi opini dan sentimen populer. Sebagian besar negara memiliki hak hukum yang diberikan oleh konstitusi mereka mengenai kepentingan masing-masing batas negara. Negara-negara bangsa mencoba melakukan diplomasi koersif sementara diplomasi lunak tidak menjanjikan solusi atau sebelum mengumumkan perang dengan negara-negara lain untuk menegaskan bahwa ini adalah batas-batas nasional. Dunia terbagi dalam beberapa negara, di mana kemudian negara-negara ini didorong untuk menekankan wilayah nasional masing-masing serta kedaulatan nasional secara paksa. Tidak pernah kurang, negara bagian yang juga secara intensif menciptakan penindasan atasnya adalah bagian daerah dalam rangka menumbuhkannya adalah negara dan pendekatan terhadap tatanan kedaulatan nasional. Namun pendekatan negara ini cenderung mengabaikan dan mengecualikan adanya hak sipil kepada partai-partai dari kebijakan pengambilan keputusan, yang mengakibatkan hanya representasi kepentingan elitis dan pribadi, bukan mewakili negara-negara besar (He & Reid, 2004:297). Sebagian besar negara yang dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikannya adalah wilayah yang sangat luas dan multi etnis menjadi tempat yang teratur, saling bergantung secara keseluruhan. Masalah ini juga telah dihadapi secara intensif oleh Indonesia, terutama dalam pengembangannya adalah nasionalisme negara (Drake, 1992:296).

Sebelum Indonesia merdeka, nasionalisme pun diperdebatkan dan ditekankan "bumiputra" dan "pribumi". Istilah "bumiputra" dan pribumi "digunakan untuk membedakan penduduk asli dari penduduk asli dan penduduk kolonial. Istilah ini mulai populer selama tahun 1920 dan 1930an di Malaysia dan juga di Indonesia. Bumiputra dan pribumi keduanya berasal dari kata-kata Sanskerta. "Bumi" yang memiliki definisi

tanah atau tanah dan "putra" bisa dipahami sebagai pangeran, atau lebih dipahami sebagai "anak". Pribumi sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa, yang berarti pribumi. Dengan demikian, konsep ini sebelumnya digunakan untuk membedakan antara penduduk asli dan penduduk tidak asli (Siddique & Suryadinata, 1981-1982:662-3). Selain keberadaan bumiputra dan pribumi, proses pencapaian persatuan nasional Indonesia adalah beberapa hal yang unik, selama enam dekade pertama, umumnya berlangsung dalam perpaduan multi etnis dan integrasi teritorial. Kebutuhan ekonomi seperti pajak, perbendaharaan, batas adat dan wilayah telah dibentuk oleh penjajah Belanda. Sebaliknya, Belanda, saat merumuskan penyatuan nasional, menyangkal nilai-nilai etnis tertentu. Memang, rasa permusuhan yang dilakukan oleh Belanda di antara orang Indonesia, bukannya memasukkan komponen prinsip multi etnis, budaya nasional dan bahasa nasional (Lane, 2002).

METODE

Penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku, dokumen, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Muhammad Kasiram, 2008). Dalam hal ini literatur yang dipakai berkaitan dengan nasionalisme, etno-nasionalisme dan *historical* Aceh. Pendekatan kepustakaan biasanya digunakan oleh ilmu sejarah. Ilmu politik juga bisa menggunakan metode kepustakaan. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan semua bahan-bahan yang dianggap perlu untuk mendukung kajian yang penulis bahas. Kemudian membuat catatan-catatan atas bahan yang terkumpul tersebut. Catatan inilah yang kemudian disebut catatan bibliografis. (Suharsimi Arikunto, 2002). Selanjutnya, data yang didapatkan dari referensi dianalisis secara deskriptif. Dimana proses analisis data dilakukan setelah penulis mereduksi data-data yang ada. Reduksi adalah analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis juga menginterpretasi data-data yang sudah direduksi, sehingga dapat dengan gampang data tersebut di-*design* menjadi sebuah hasil penelitian, dimana hasil tersebut telah penulis jabarkan di dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual

Asal-usul bangsa berasal dari konsep bangsa Barat, pada abad ke-18 orang-orang kelas menengah di Eropa Barat dan Amerika Utara semakin mengenal dengan perasaan bahwa "bangsa" itu milik mereka. Dua ilustrasi tertua tentang kesadaran nasional modern adalah bahasa Prancis dan bahasa Inggris (Knight, 1982:518-519). Menurut Ernest Renan bahwa sebuah bangsa adalah "jiwa, prinsip spritual" dan bahwa dia melanjutkan keberadaan sebuah bangsa adalah hasil dari "plebisit harian" (dalam Savich: 2). Istilah bangsa dapat dipahami sebagai apa yang dijelaskan oleh Ernest Barker "sekumpulan manusia, yang mendiami wilayah yang pasti, yang biasanya diambil dari ras yang berbeda, namun memiliki kesiapan berfikir dan perasaan yang sama yang diperoleh dan digunakan selama perjalanan Sejarah umum .. "(Egyankosh:31).

Anderson berpendapat bahwa sebuah bangsa adalah komunitas yang dibayangkan karena tidak mungkin semua anggota saling berhubungan langsung dengan sesama anggota setiap saat. Oleh karena itu, anggotanya hanya bisa memandang bangsa secara keseluruhan dengan mengacu pada imajet tersebut yang mereka temukan dalam pikiran mereka sendiri (Tamir, 1995:421). Peter Alter mengatakan bahwa nasionalisme adalah "salah satu pemikiran yang paling ambigu di masa depan, terutama dalam konsep politik dan analisis leksikon. Setelah mendefinisikan dua jenis utama nasionalisme: nasionalisme Risorgimento yang berarti kebangkitan orang Italia yang berlaku bagi negara-negara yang berusaha membangun sebuah negara. Seperti Yunani, Italia, Jerman, Polandia, Serbia dimana menerapkan nasionalisme ini di abad ke-19. Kedua, nasionalisme integral, juga dikenal sebagai "radikal", "ekstrem", sayap kanan, reaksioner, agresif-ekspansionis, derivatif, nasionalisme militan. Nasionalisme integral mulai ada setelah sebuah negara telah mencapai kemerdekaan dan telah membentuk sebuah negara, seperti Nazi Jerman dan Fasis Italia (Savich:5). Nasionalisme sebagai ideologi politik modern hanya ada setelah mengikuti revolusi Prancis tahun 1789 dan berkembang selama abad ke-19. Nasionalisme yang diraihnya adalah tinggi pada saat Perang Dunia I. Nasionalisme bergantung pada fantasi kelompok atau "komunitas imajiner" dan produk industrialisasi, kapitalisme, dan modernisasi. Industrialisasi dan

nasionalisme berkembang dan berkembang dalam hubungan simbiosis, masing-masing saling menegakkan (Savich:1-2).

Meskipun demikian, istilah "nasionalisme" memiliki berbagai makna, namun secara sentral terdiri dari dua karakteristik: Pertama, sikap yang dimiliki oleh anggota sebuah bangsa ketika mereka peduli dengan identitas mereka sebagai anggota negara tersebut; Kedua, tindakan yang diambil oleh anggota sebuah negara untuk berusaha mencapai (atau mempertahankan) beberapa bentuk kedaulatan politik (Plato, 2001:2). AD Smith menawarkan definisi nasionalisme yang lebih merangkul sebagai gerakan ideologis, untuk pencapaian dan pemeliharaan pemerintahan sendiri atas nama sebuah kelompok, beberapa di antaranya anggotanya menganggapnya sebagai sebuah 'bangsa' aktual atau potensial seperti yang lain (dalam Smith, 2000:492). Shafer dan Kedouri akan setuju bahwa nasionalisme melibatkan mitos yang berhubungan dengan dan mendorong perasaan kesetiaan terhadap dan identifikasi dengan kesadaran kelompok tentang dirinya sendiri dan menyebabkan kelompok tersebut memiliki atau menginginkan kemerdekaan politik di bawahnya adalah pemerintahan sendiri dan merupakan wilayahnya sendiri. Mereka pasti juga setuju bahwa nasionalisme secara keseluruhan adalah kompleks gagasan, sikap, peristiwa, dan gerakan politik. Nasionalisme tentu sebuah ide, tapi juga merupakan kekuatan (Knight, 1982:521).

Thomas Hobbes (1588-1679) menjelaskan kedaulatan sebagai monopoli kekuatan pemaksaan dan menganjurkan agar hal itu dilakukan di tangan peraturan tunggal yang tidak dapat dilawan (Heywood, 2000: 38). Kedaulatan, di dalamnya adalah pengertian yang paling sederhana, adalah prinsip kekuatan absolut dan tak terbatas. Setelah kemunculan negara modern, istilah kedaulatan telah diperbesar dan diklasifikasikan. Ada banyak jenis kedaulatan, semacam kedaulatan hukum yang menunjukkan otoritas hukum tertinggi yang berarti hak yang tidak dapat dipungkiri untuk menuntut kepatuhan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang; Kedaulatan politik menunjukkan kekuatan politik yang tidak terbatas, yaitu dengan menggunakan kekuatan koersif monopoli untuk menegakkan ketaatan; Kedaulatan internal berarti bahwa kekuasaan atau wewenang tertinggi di negara yang berada di badan hukum yang membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat semua warga negara, kelompok, subkelompok dan institusi di dalam batas wilayah negara; Dan kedaulatan eksternal

berkaitan dengan posisi negara di masyarakat internasional dan kapasitas untuk bertindak sebagai entitas independen dan otonom (Heywood, 2007:131).

Pembahasan

Di Indonesia, isu tuntutan politik Islam terhadap negara digambarkan dengan jelas dalam pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintah pusat antara tahun 1948 dan 1962. Serangkaian pemberontakan bersenjata terinspirasi Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh benar-benar dihadapi oleh Angkatan Darat Indonesia (Ramage, 2005:6). Di Eropa, nasionalisme adalah interpretasi situasi, terlepas dari konteks politik atau ideologisnya. Hal ini cukup jelas, bahkan pada tingkat fenomenologis, bahwa nasionalisme adalah ideologi politik yang penting, dasar untuk interpretasi historis dan sumber legitimasi pemerintah berbagai negara ini. (Puhovski, 2004:212). Dengan demikian tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengadopsi pemahaman Eropa seperti itu adalah nasionalisme nasional. Komunitas etnis telah lama menjadi pola sosio-kultural untuk organisasi dan komunikasi manusia, ia memiliki seperangkat tradisi yang unik untuk dirinya sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. Tradisi semacam itu mencakup bahasa atau mitos umum tentang kesamaan atau tempat asal, praktik budaya di tingkat kabupaten dan rasa kontinuitas historis. Hubungan primordial ini menghasilkan rasa identitas etnik dan solidaritas yang kuat dan mendorong munculnya nasionalisme etnis (Thaib, 2000:1).

Elit politik Indonesia mengatur Indonesia sebagai negara yang tidak berkearifan lokal. Keanekaragaman etno-budaya harus dihapus. Perbedaan etnis harus diubah menjadi New Indonesia yang baru dibentuk (Indonesia Raya). Pembangunan negara dianggap sebagai agenda penting utama dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa terpadu. Tujuan ini dapat dicapai dengan de-politisasi semua identitas regional dan etnis dan memaksakan perbedaan ini di bawah satu kesatuan Indonesia. Bagaimanapun, strategi ini tidak didasarkan pada prinsip etnik maupun identitas agama, namun wilayah tersebut merupakan target utama pembentukan nasionalisme (Kreuzer, 2004:20).

Oleh karena itu, Indonesia telah menegaskan kebijakan integratif untuk mengembangkan hubungan di antaranya adalah multi etnis dan penduduk lainnya. Untuk mendukung kebijakan integratif ini, maka pemerintah pusat tidak hanya

mengendalikan agenda politik regional, tapi juga agenda keaksaraan, seperti pendidikan. Tidak luput, program transportasi dan komunikasi harus dipantau pengamatan sentral. Yang lebih krusial adalah pembangunan ekonomi di sub-wilayah secara sengaja membuat pengaturan yang saling tergantung, dan program transmigrasi telah memainkan cara lain untuk menyebarkan nasionalisme, dengan memindahkan penduduk kelompok etnis luar Aceh yang dominan ke daerah-daerah (pinggiran), Dan juga untuk melindunginya sebagai keamanan teritorial (Drake, 1992:296).

Bahayanya jelas, bahwa mayoritas etnik mulai mendominasi seputar visi *ethno cultural*, negara yang memfasilitasi status mayoritas lebih tinggi daripada etnis minoritas lainnya, sementara dalam istilah mereka, etnis minoritas mulai memobilisasi sekitar multi nasionalis. Visi yang mengutamakan hak-hak etnis minoritas (Brown, 2007:7). Mayoritas kelompok etnis di Indonesia mengklaim diri mereka unggul dalam setiap aspek, baik secara kultural, politik, ekonomi dan sosial namun tidak menunjukkan kebersamaan dalam memperlakukan eksistensi minoritas (Drake, 1992:302). Apalagi nasionalisme Indonesia dipusatkan pada kesatuan bangsa, berarti kesatuannya adalah rakyat (rakyat). Kesatuan ini diamati tidak hanya sebagai kekuatan politik yang aktif namun sebagai unsur bangsa yang dinamakan tindakan politiknya dapat dibenarkan (Lanti, 2002:201). Strategi dominasi nasionalisme etnis dari luar Aceh dan sistem sentralisasi pemerintahan telah memberi ruang lebih besar untuk menghidupkan kembali gerakan penentuan nasib sendiri di wilayah Indonesia. Alasannya adalah bahwa Indonesia telah sering mengenakan hak minoritas dan juga pemerintah pusat menciptakan konflik sosial dan politik lokal (Bowen, 2005:155).

Akibatnya, tantangan vertikal ada di Aceh, Papua dan Maluku, sementara ada tantangan horisontal antara orang Dayak dan orang Madura di Kalimantan Barat dan Tengah, dan antara kelompok agama (Kristen dan Muslim) di Maluku dan Sulawesi Tengah. Selain itu, ada juga kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa, terutama pada tahun 1998, dan antara agama-agama lain, kelompok regional dan politik (Kingsbury, 2002:69). Dalam tiga kasus - Aceh, Timor Timur dan Papua Barat, ada gerakan separatis berdasarkan persepsi perbedaan etnis, namun dalam masing-masing kasus, negara pusat terutama mengandalkan solusi militer (Turner, 2005:188-89).

Daerah-daerah ini menolak kedaulatan Indonesia yang berbasis di wilayah Hindia Belanda (Hindia), dengan mengklaim bahwa negara penerus tidak mewakili

kesepakatan (Timor Lorosa'e, Papua Barat dan Aceh) atau di mana negara pendahulu / penerusnya dipahami sendiri sebagai tidak sah (Misalnya NEI), klaim yang sah ini sulit dipertahankan dengan kelompok nasionalis intra-negara tertentu (Kingsbury, 2002:70). Dengan demikian berdasarkan kekhasan etnik ini, permintaan untuk separatisme regional sangat didukung oleh gerakan etno-nasionalisme.

Konflik etnis nasionalis secara intensif muncul setelah jatuhnya mantan presiden Soeharto, diikuti oleh perselisihan regional antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk Aceh dimana konflik tersebut kembali muncul. Gerakan etno nasionalis ini mendapat dukungan tidak hanya dari penduduk setempat, namun sangat didukung oleh kelompok pemberontak separatis. Munculnya gerakan etno-nasionalis ini karena model nasional Indonesia, khususnya instrumen yang diterapkan selama rezim Soekarno maupun Suharto. Bukan hanya model ini yang mengecewakan dan tidak sesuai dengan identitas kelompok namun ini berarti implementasinya sangat ditentang oleh daerah. Rezim Orde Baru mengerahkan alat pemaksa dalam membangun persatuan dan mempengaruhinya lewat visi tentang warga negara dan mengikis perlawanan yang ada (Bertrand, 2002:11-12). Kepentingan regional di Aceh cenderung memiliki kondisi pra-kolonial, dimana Aceh ditingkatkan atau diperburuk oleh proses kolonial dan pasca kolonial. Hal ini bisa dikatakan mencakup dorongan identitas regional untuk tujuan pembagian dan pengaturan. Penggunaan tentara dari satu daerah melawan orang-orang lain, dan melalui relokasi loyalis ke daerah-daerah di mana kesetiaan dicurigai, seperti Aceh, seringkali dengan cara menghilangkan tekanan populasi di wilayah jantung loyalis (Kingsbury, 2002:70). Salah satu pilihannya adalah, Indonesia berusaha mengintegrasikan rakyat Aceh, dengan meluncurkan program transmigrasi, mengangkut ribuan orang ke luar Jawa dan Madura ke Aceh Selatan dan Barat, dengan sedikit keberhasilan secara ekonomi, namun mungkin dengan dampak keberhasilan jangka panjang terhadap masyarakat (Blaskett, 2006:5).

Dengan demikian, kaum nasionalis etno Aceh membuat pilihan mereka untuk menuntut kemerdekaan setelah lama menderita karena dikucilkannya dari kerangka patronase negara pusat, diikuti oleh kegagalan negara dalam menawar dengan tuntutan etnis nasionalis Aceh ini, dan kemudian menyebabkan kekecewaan sepenuhnya terhadap pemerintah pusat berdasarkan hal tersebut. Aceh mulai menolak kekuasaan yang diberikan oleh Jakarta dengan sedikit sumber daya yang diterima (Brown, 2004:6).

Meskipun, tidak ada hubungan langsung antara konflik di Aceh dan kebangkitan nasionalisme Aceh. Lebih dari dua dekade masyarakat Aceh telah menyumbangkan usaha mereka untuk mengakhiri kebijakan sepihak yang dipraktikkan oleh berbagai rezim pemerintah pusat Indonesia beserta militernya.

Pada abad keenam belas, Kesultanan Aceh menguasai sebagian besar Sumatera dan beberapa bagian di Malaya. Kolonial Belanda menghadapi berbagai kesulitan dalam menaklukkan tanah Aceh di akhir abad kesembilan belas dan wilayah Aceh sebagian berada di bawah kendali militer Belanda sampai tahun 1942 sementara Jepang menyerang Indonesia. Secara umum, kolonial Belanda mampu mencapai hampir semua bagian Indonesia lainnya kecuali Aceh. Pendudukan Aceh oleh Belanda menyebabkan eksistensi nasionalis Aceh (Bowen, 2005:159). Selama masa Kesultanan di Aceh, Aceh memiliki banyak batas pra-kolonial, yang meliputi penaklukan sampai Pahang di pantai timur Semenanjung Malaysia, dan ini masih ada di perbatasan pasca-kolonial (He & Reid, 2004:294). Dalam tradisi politik Aceh, negara ditafsirkan sebagai wali hak-haknya adalah warga negara, termasuk hak untuk menjalankan agama mereka tanpa halangan. Hal ini mencerminkan peran tradisional kepala negara, baik sultan maupun wali naggroe (penjaga negara) (Kingsbury, 2002:4).

Sebelum invasi Belanda ke Aceh, Aceh secara politis, sosial, ekonomi dan budaya terhubung erat dengan Samudra Hindia dan Semenanjung Malaya, serta Aceh dengan bangga menjadi negara merdeka sebelum pemindahan kekuasaan dari kerajaan kolonial Belanda ke republik Indonesia. Sebaliknya, masyarakat Aceh tidak mengenal pemindahan kekuasaan ini dan menyalahkannya sebagai proses ilegal. Pergeseran kekuasaan ini dianggap sebagai pelanggaran hak kedaulatan Aceh. Di sisi lain, nasionalis Indonesia menafsirkan Aceh telah berbagi dalam jumlah besar sejarah perjuangan kolonial berjuang melawan Belanda, yang mengkonsolidasikan dan mengintensifkan identitas Indonesia (He & Reid, 2004:294).

Munculnya perasaan etno-nasionalis di Aceh, berasal dari konsepsi Indonesia, yang sebelumnya didukung oleh rakyat Aceh, warga Aceh sepenuhnya mendukung revolusi pemerintah Indonesia melawan penjajahan Belanda pada tahun 1945. Sejak awal, penduduk Aceh mendapat permintaan Nasionalisme Islam yang akan diadopsi untuk Indonesia setelah kemerdekaan. Sebaliknya, mantan presiden Sukarno, memutuskan nasionalisme sekuler sebagai landasan fundamental Negara. Berawal dari

keputusan ini, warga Aceh dan terutama pemimpin ulama terlibat pemberontakan Darul Islam yang berawal dari gerakan pemberontakan Jawa Barat. Masyarakat Aceh telah membentuk perasaan identitas kelompok yang kuat yang sayangnya tidak pernah sepenuhnya diakui oleh pemerintah pusat mengenai identitas yang bersangkutan (Bertrand, 2002, hal 19). Selain itu, kemunculan gerakan penentuan nasib sendiri di Aceh telah didorong oleh meningkatnya pelanggaran kedaulatan Aceh sejak tahun 1950an (Lane, 2002).

Daud Beureueh adalah salah satu pemimpin Aceh yang memimpin masyarakat Aceh untuk berperang melawan Belanda, sampai Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada pemerintahan Sukarno. Beberapa tahun setelah kemerdekaan, Daud didukung integrasi penuh Aceh ke dalam negara bangsa yang baru di Indonesia dengan memberikan Aceh sebuah wilayah khusus. Namun pada tahun 1953, Daud memimpin pemberontakan di Aceh mengkritik pemerintah pusat di Jakarta (Aguswandi). Warga Aceh telah memiliki kekuatan politik kecil dan sedikit ruang untuk mempraktikkan keyakinan religi mereka dan kekhasan budaya mereka dalam ruang lingkup dan model nasionalisme Indonesia (Bertrand, 2002:21).

Bertentangan dengan historiografi resmi Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berpendapat bahwa Aceh tidak secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945 namun digabungkan secara ilegal (Schulze, 2004:6). Sebenarnya, masyarakat Aceh memperlakukan Indonesia tidak lebih sebagai negara intim, khususnya dalam integrasi nasional dan juga nasionalisme Indonesia, sebaliknya, Indonesia kemudian menganggap gerakan separatis Aceh sebagai ancaman pahit dan paling berbahaya daripada kekuatan Belanda (Mabry, 2005:14). Indonesia memperlakukan berbagai ketentuan untuk minoritas yang berbeda. Meskipun demikian, negara ini terbagi menjadi dua puluh tujuh provinsi. Sebaliknya, Jakarta dan Jogjakarta lebih berkembang, karena kedua kota ini merupakan bagian dari wilayah Jawa. Suku minoritas etnis seperti Aceh menawarkan provinsi khusus terbatas, dan sisanya seperti masyarakat Batak, masyarakat Dayak, Ambon dan Timor-timor diperlakukan sama sekali tanpa otonomi (Drake, 1992:300). Melihat ketidaksetaraan ini, warga Aceh yang marah pada pemerintah pusat, tidak hanya berdasarkan dominasi pusat di posisi aparatur negara di provinsi yang paling krusial, pemerintah pusat telah menduduki setiap aktivitas sehari-hari di Aceh, militer dan pegawai negeri berada di bawah reservasi

mereka. Terlebih lagi, perilaku pemerintah pusat menindas masyarakat Aceh atas keuntungan mereka. Karena Aceh juga kaya akan minyak dan gas bumi yang dianggap sebagai gas alam terbesar ketiga di Indonesia (Mabry, 2005:13).

Pusat menganggap dirinya sebagai tempat inti hanya karena itu adalah keunggulan politik di atas sub-daerah (pinggiran), secara ekonomi, dibandingkan dengan daerah lain, pusat tidak memiliki investasi untuk pembangunan negara, dan juga tidak memiliki sumber daya alam (Drake,1992:113). Karena Aceh memiliki provinsi sumber daya yang kaya, segera setelah temuan minyak dan gas di sana, permintaan suksesi semacam itu dapat muncul, sebagai tanggapan atas eksploitasi ranjau darat mereka di pusat (Brown, 2004:5). Rejim Orde Baru sangat memaksakan kebijakan untuk memberantas gerakan etno-nasionalis Aceh, penempatan militer adalah strategi terbaik. Terlepas dari pendekatan represif dan metode pemaksaan yang diterapkan sebagai model nasional Indonesia di bawah Soeharto, terlepas dari pengecualian etno-nasionalis ini dapat dihapus atau dikurangi, sebaliknya, hal itu semakin menguat dan mendorong rasa etno-nasionalis di masyarakat Aceh. Kekecewaan besar model nasionalisme Jakarta menjadi bukti dukungan intensif untuk kemerdekaan, yang muncul saat Indonesia mulai menuju transisi demokrasi (Bertrand, 2002:19-20).

Pemberontakan pemerintah Indonesia dan Gerakan Merdeka (GAM) saling mengklaim sejarah dan budaya suatu bangsa. Keduanya sangat berpegang pada kesamaan psikologi, bahasa dan biologi, dan keduanya menegaskan bahwa pemahaman historis adalah wilayah masa lalu harus mempertimbangkan pilihan wilayah dan identitas nasional saat ini (He & Reid, 2004:294). Kedaulatan Indonesia dan integritas teritorial telah banyak dikritik, terutama jalan usahanya untuk melindungi mereka (Schulze, 2003). Warga Aceh merasa bahwa mereka tidak pernah dikenalkan penggabungan legitimasi mereka ke Indonesia, sebaliknya negara Indonesia menyerbu mereka (John R. Bowen, hal 159). GAM memiliki dua alasan untuk kedaulatan merdeka: Pertama, Aceh adalah negara merdeka yang diakui secara internasional sebagaimana dicontohkan oleh perjanjian 1819 antara Sultan Aceh dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia atau perjanjian Belanda Anglo tahun 1824. Dengan alasan ini, kedaulatan seharusnya dikembalikan ke Kesultanan Aceh dan bukan Republik Indonesia (Di tiro dalam Schulze, 2004, hal 6).Kedua, tidak ada referendum yang diadakan dengan masyarakat Aceh atau Sumatrans, dan juga dengan wilayah kolonial

terpisah lainnya, apakah mereka ingin bergabung dengan Republik Indonesia atau tidak. Tidak ada dekolonisasi yang terjadi di Hindia Belanda. Hanya saja nama itu diubah menjadi Indonesia dengan Indonesia yang hanya merupakan ungkapan geografis, bukan nama yang tepat dari orang mana pun, atau negara manapun, atau pulau mana pun (Thaib, 2000:4).

Sukarno tidak terlihat mewakili rakyat Aceh, dan Aceh berjuang untuk merdeka dari negara baru Indonesia (Blaskett, 2006:3). Dengan demikian, Di Tiro tidak pernah mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. "Bangsa Indonesia menyerap," katanya. Ini hanyalah nama lain untuk Hindia Belanda dengan penguasa baru, pemerintah pusat dan bukan orang Belanda (Lintner, 1999:18). Kesatuan 'persatuan' atau 'kewarganegaraan' Indonesia tidak memiliki legalitas hukum berdasarkan hukum dekolonisasi dan administrasi kolonialis yang berbasis di Jakarta, tidak dapat secara sah menolak hak penentuan nasib sendiri dan memisahkan keberadaan hukum masyarakat Aceh, dan juga kepada orang-orang lain dari wilayah penjajahan Belanda sebelumnya (Thaib, 2000:2).

Apalagi, sementara identitas Indonesia adalah nasionalisme sipil yang termasuk multi agama, multi etnis, multi suku, nasionalisme Aceh bersifat etnik dan eksklusif. Hal ini didasarkan pada pengenalan identitas suku Aceh terhadap delapan atau sembilan suku lainnya di wilayah tersebut untuk menciptakan bangsa Aceh (Schulze, 2003). Aceh sendiri, terdiri dari sejumlah kelompok bahasa yang berbeda, dan di dalam mayoritas pembicara Aceh merupakan pertentangan serius dan jangka panjang antara daerah (Bowen, 2007:11). Bagi orang Aceh, penerapan pengkhianatan jenis nasional Indonesia yang mereka minta model Islam untuk diterapkan di Indonesia (Bertrand, 2002:24). Sifat pemberontakan dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap Belanda sangat kuat sehingga Belanda mulai melihat Aceh dalam istilah budaya yang luar biasa. Yaitu, memiliki penekanan kuat pada identitas religius, tidak ada batasan dengan fanatisme agama. Deskripsi tentang 'identitas budaya' yang luar biasa ini terus berlanjut sampai saat ini, mengacu pada kekhasan etnis dan kesukaan Islam daerah (Daud dalam Sundararaman:5).

Kasus Aceh selalu dikaitkan dengan nasionalisme junta. Menanggapi rezim orde baru, masyarakat Aceh telah menggunakan otoritas Aceh sendiri untuk memiliki pemahaman identitas etnik untuk melawan kediktatoran Jakarta. Dengan demikian,

nasionalisme Aceh tampaknya dapat mempertahankan identitas mereka dari hegemoni Indonesia di wilayah ini. GAM telah berhasil mengurangi hegemoni Jakarta selama masa konflik, yang mengakibatkan banyak imigran non Aceh telah meninggalkan Aceh. Meski begitu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sering dicirikan sebagai organisasi Islam. Meskipun, ada pengaruh Islam yang jelas, GAM adalah organisasi nasionalis, tujuan politik yang secara eksplisit didasarkan pada wilayah dan bukan agama (Kingsbury:1)). Hasan Di Tiro menggambarkan perjuangannya sebagai nasionalis dan bukan Islam. Memang, dia mengatakan bahwa dia mempertahankan kontak dekat dengan gerakan separatis Kristen di Maluku dan Timor Lorosa'e. "Pemerintah adalah musuh bersama kita", katanya (Lintner, 1999:19). Bahkan saat ini, pada saat Indonesia menghadapi konsolidasi demokrasi, Aceh tidak menaruh minat pada proses demokrasi nasional ini, karena mereka telah membentuk pengalaman unik dan menyatukan identitas mereka. Karena masyarakat Aceh tidak mempercayai tawaran yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia (Bertrand, 2002:21).

Hal ini didukung oleh Hasan Di Tiro yang mengatakan bahwa "Saya tidak ingin berbicara dengan mereka (pemerintah Indonesia). Tidak akan ada solusi sampai dan kecuali tentara pendudukan pusat meninggalkan Aceh (Lintner, 1999:18). Namun, bentuk pemerintahan terpusat di Indonesia telah menjadi tantangan bagi hampir semua wilayah regional, dan Aceh pada khususnya. Karena alasan ini, warga sipil terlihat meningkatkan kekerasan dan tuntutan separatis akan membuat Jakarta merasakannya sebagai model nasionalisme (Bertrand, 2002:21). Model nasional ini juga mengakibatkan separatisme Aceh sebagai hasil penjajahan internal Jakarta, karena warga Aceh merasakan banyak ketidaksetaraan yang mereka terima dari Jakarta dan tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada pemerintah pusat (David Brown, 2004:5). Namun, ada juga kelas menengah Aceh yang menuntut untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia, akan tetapi dengan otonomi yang besar untuk diserahkan serta wilayah tersebut menerima pembagian besar dalam pendapatan penghasilan domestiknya. Akan tetapi kelas menengah Aceh ini jumlahnya kecil (Siegel, 2002:201). Belajar dari pengalaman Negara-negara di Balkan dan eks Uni Soviet, pemerintah dapat mengakomodir perbedaan yang menyeluruh di semua wilayahnya, dari Papua hingga Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme daerah sebagai kebenaran yang edukatif, sehingga etnis nasionalis daerah akan tertransformasi secara

seiring berjalan waktu, imbas dari pada keikutsertaan pengayoman pemerintah pusat. Pengayoman dapat berupa kebijakan nasional apapun terhadap daerah, kepedulian Negara terhadap rakyat daerah selain dari pada otonomi daerah dan otonomi khusus. Nasionalisme raya hanya dapat tercapai dengan memfasilitasi etno-nasionalisme daerah. Dengan kata lain untuk menjadikan nasionalisme grater Indonesia tidak dibangun atas ajas ketakutan, kecurigaan terhadap suburnya etnis nasionalisme di daerah. Pasca Aceh damai, Aceh merupakan contoh dari reintegrasi etnonasionalisme hingga mengarah kepada nasionalisme Indonesia Raya. Sebesar apa penerimaan etno nasionalisme daerah oleh pemerintha pusat, maka akan sebesar itu pula rasa emosional etno-nasionalisme daerah terhadap nasionalisme raya Indonesia.

Dalam era digital yang tanpa batas sekarang, memaksa Negara untuk senantiasa beradaptasi dengan perbedaan kultur dan lainnya yang ada di daerah. Tidak jarang dilihat, untuk memadukan etnonasionalisme dan nasionalisme Negara terlibat yang nama Negara asing. Perdamaian Aceh dimana konflik yang berkepanjangan terjadi dapat diakiri dengan perundingan yang difasilitasi aktor luar. Pemerintah Indonesia dalam bentuk memorandum of understanding-nya dengan warga Aceh, telah menjembatani perbedaan nasionalisme antara RI dan Aceh dengan formasi Partai Lokal dan lainnya. Ini merupakan embrio meghidupkan kembali rasa memiliki ke-Indonesiaan Aceh melalui demokrasi lokal yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini, tujuan Aceh untuk merdeka dari ibu pertiwi tertransformasi kepada integrasi Aceh kepada Indonesia seutuhnya.

KESIMPULAN

Rekonstruksi integrasi nasional dan infrastruktur ekonomi menjadi sasaran utama saat awal kemerdekaan Indonesia (Drake, 1992:297). Nasionalisme menjastifikasi keberadaan orang dan menyatakan bahwa mereka berhak mengambil alih sebuah organisasi negara lama atau membangun yang baru. Gerakan nasionalis mencoba melakukan ini atas nama orang-orang yang terlibat dalam sejarahnya. Biasanya, para pemimpin gerakan semacam itu berasal dari pusat atau lebih tepatnya, wilayah perkotaan yang luas dari negara yang dipertimbangkan (McIntyre, 1973:75). Tidak pernah kurang seperti Indonesia, yang terutama meliputi negara kepulauan, di mana bapak pendiri gerakan nasionalis berasal dari Center Jakarta. Di negara yang berbeda secara geografis dan etnis seperti Indonesia, proses hubungan regional

seringkali mengharuskan penahanan sejarah dan tradisi penduduk lokal yang mendukung warisan yang lebih besar (Hoey, 2003:110).

Berdasarkan keanekaragaman geografis ini, Sukarno menggunakan konsep 'Indonesia Raya' sebagai konsep nasionalisme Indonesia, yang ditujukan untuk perumusan masyarakat Indonesia (McIntyre, 1973:75). Sayangnya, setelah kemerdekaan, Indonesia ditantang oleh gerakan *Darul Islam (House of Islam)*, yang mendukung nasionalisme Islam dan bukan nasionalisme sipil. Beberapa asosiasi semacam itu terikat untuk membentuk antara Islam dan nasionalisme Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada norma etnologi dan adat mereka, dan terlebih lagi Indonesia terbagi oleh sejumlah besar pulau terpencil dan terpisah, maka penyatuan paksaan dan integrasi koersif merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk menghadapi keragaman tersebut (Vandenbosch, 1952:182). Nasionalisme Indonesia digunakan untuk mendukung dan mempromosikan rasa homogenitas dan identitas pribumi yang dengan kuat menolak dan mengecualikan partisipasi masyarakat imigran non pribumi (Siddique & Suryadinata, 1981-1982:667).

Apalagi nasionalisme Indonesia secara ideologis dimanifestasikan dalam Pancasila, lima prinsip negara: kepercayaan kepada Tuhan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini dipostulasikan sebagai nilai bersama yang mendukung masyarakat toleran sekuler, majemuk, dan religius (Weatherbee, 2002:23). Pemerintah menganggap etnis sebagai masalah sensitif, kemungkinan ancaman terhadap persatuan nasional dan bahkan tidak mengumpulkan statistik tentang kelompok etnis dalam sensus (Suryadinata yang dikutip oleh Turnet, 2005:189). Tidak ada bagian dari orang yang dapat menuntut hak individu untuk dirinya sendiri atau meminta pembagian kekuasaan ke dalam sub masyarakat, tidak ada konflik yang diizinkan untuk terjadi (Kreuzer, 2004:19).

Setelah Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 setelah kolonialisme, nasionalisme, dan revolusi, elite di antara berbagai kelompok, agama, dan ras bertekad untuk membentuk identitas nasional yang baru dan, dengan demikian, menundukkan kesadaran politik mereka yang terpisah. (Wanandi, 2002:136). Umumnya gerakan separatis regional muncul karena ketidakbahagiaan pemerintah regionalisme ketika pemerintah Indonesia diubah dari sistem federal menjadi sistem kesatuan pada bulan Agustus 1950, yang menyebabkan ketidakpuasan provinsi dengan melakukan

pemberontakan terbuka kepada pemerintah pusat. Negara-negara regional merasa kurang berkuasa di pemerintahan setempat setelah konversi ini (Vandenbosch, 1952:184). Sebagian besar analis politik berpendapat bahwa faktor utama perselisihan nasionalisme Indonesia yang didukung oleh nasionalis sekuler Indonesia adalah memberlakukan identitas nasional yang seragam untuk seluruh warga negara Indonesia. Implementasinya sebenarnya tidak sesuai dengan budaya sub nasional dan juga identitas regional (Arifianto, 2008:6). Begitu etnis minoritas kehilangan kepercayaan bahwa negara dapat mempromosikan nasionalisme kewarganegaraan, mereka kemudian menganggap negara sebagai badan mayoritas etnik dan karena itu tidak percaya bahwa ini adalah janji multi-budaya tentang status atau otonomi kepada etnis minoritas akan tercapai, bahkan dapat menyebabkan melemahnya nasionalisme sipil (Brown, 2001:12).

Hal ini diperburuk oleh keyakinan nasionalis sekuler bahwa penciptaan sebuah bangsa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki pengalaman bersama, terlepas dari budaya, agama, dan latar belakang etnis mereka (Arifianto, 2008:9). Sejak kemerdekaan, sebagian besar provinsi telah mendorong satu atau lain niat untuk memberontak terhadap pemerintah pusat, apakah karena gerakan separatis menuntut pembagian kekuasaan yang sama atau menuntut kemerdekaan negara baru (John R. Bowen:155).

Strategi politik Orde Baru yang ditetapkan dengan model nasional dan selanjutnya ia menghilangkan gerakan etno-nasionalis. Dalam praktik politik sehari-hari, model nasional dipaksakan pada ekonomi, birokrasi melalui eksistensi tentara di luar provinsi. Sistem pendidikan nasional yang umum dibuat, membuat bahasa Indonesia diwajibkan di setiap sekolah. Kebijakan ini direncanakan untuk mengubah provinsi-provinsi dan memasukkan mereka ke dalam negara Indonesia modern secara efektif (Bertrand, 2002:23-4). Menurut rezim otoriter Orde Baru, nasionalisme etno-kultural bergantung pada mitologi sejarah untuk menarik orang Jawa sebagai inti etnis, sementara perekrutan menjadi posisi elite pada tingkat tertentu, bergantung pada penjajahan. Banyak daerah di Indonesia menentang penggunaan simbol ini (Majapahit dan Sriwijaya), terutama mereka yang berasal dari kedua kerajaan Jawa kuno ini, dengan alasan bahwa memuliakan simbol ini dapat menyatukan integritas nasional dan menolak adanya kolonisasi non Sriwijaya dan Majapahit lainnya. (dalam Drake, 1992, hal 298). Warga asli Indonesia ditantang oleh masalah persatuan nasional dan

pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketidakseimbangan representasi kelompok etnis dalam aspek politik maupun distribusi ekonomi sejak kekalahan kolonial Belanda masih berjalan sampai sekarang (Siddique & Suryadinata, 1981-1982:663).

Tapi sebenarnya, bisa jadi ada banyak bentuk persatuan, semacam konfederasi, federasi dan bahkan aliansi antara negara merdeka. Pada saat yang sama bentuk semacam ini harus diikuti dengan berhenti dari semua jenis paksaan (Lane, 2002). Karena masyarakat Aceh dihadapi dengan menggunakan senjata oleh pemerintah pusat, maka penduduk Aceh memperlakukan Indonesia tidak hanya sebagai intim, khususnya mengenai integrasi nasional Indonesia dan juga nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, Indonesia kemudian menganggap gerakan separatis Aceh sebagai ancaman pahit dan paling berbahaya daripada Belanda sebelumnya (Mabry, 2005:14). Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, naluri nasionalisme etno kembali ada di setiap wilayah di Indonesia, khususnya Aceh. Kaum etno-nasionalis muncul dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM), walaupun pemberontakan ini ditindas oleh pemerintah Orde Baru paling awal, namun keberadaannya selama transisi demokrasi di Indonesia mendapatkan dukungan rakyat yang sangat besar dari orang Aceh (Bertrand, 2002:21). Untuk pejuang Aceh Merdeka (GAM), perang dengan Indonesia membunuh, apakah itu orang sipil etnis non Aceh atau militer Indonesia, karena motivasi perang GAM didasarkan pada kebencian etnis paroki (Schulze, 2003). Warga Aceh sama sekali menolak gagasan tentang dugaan keberadaan 'bangsa Indonesia' pada basis sejarah, budaya, sosiologis, antropologi, ekonomi dan politik (Thaib, 2000:3). Selain itu, Aceh sebagai wilayah perifer di negara ini dieksploitasi sebagai koloni internal (Brown, 2001:13). Model nasionalisme nasional telah gagal, karena keterasingan inklusif kelompok dalam model itu sendiri dan menolak identitas mereka serta diikuti dengan membatasi budaya mereka juga. Multi etnik menuntut pengakuan dari negara pusat, dan dengan demikian tidak adanya pengakuan etnik dan budaya ini, mereka bermaksud untuk menekankan identitas etnik mereka dari mobilisasi dan pemisahan etno-nasionalis dari negara utama (Bertrand, 2002:25).

Kemudian konflik etnis dapat mulai dilihat sebagai manifestasi dari ketegangan yang timbul dari artikulasi visi masyarakat nasional yang berlainan, dan berpotensi tidak sesuai, (Brown, 2001:6). Mobilisasi dan kekerasan etno-nasionalis sering terjadi di negara transisi demokratis dimana kesepakatan sebelumnya mengenai

model nasional belum disepakati. Definisi, wilayah dan agenda politik bangsa tetap tidak terdefinisi untuk menciptakan ketidakpastian tentang masuknya kelompok atau istilah inklusifitas mereka (Bertrand, 2002:2).

Setelah tahun 1999 Indonesia masih ditantang oleh gerakan etno-nasionalis di Aceh. Para aktivis kemerdekaan di wilayah ini menekankan kembali gagasan bahwa mereka telah diintegrasikan secara kuat ke Indonesia menyusul eksploitasi ekonomi lokal Jakarta yang telah memperburuk situasi (Klinken, 2003:126). Implikasinya adalah bahwa nasionalisme Aceh, klaim bahwa orang Aceh adalah orang-orang dengan satu kesamaan, seperti nasionalisme lainnya (Brown, 2004:16), yang pantas membentuknya adalah negara merdeka sendiri. Namun, negara yang ada akan selalu berusaha mencegah pemisahan diri, meski hal ini tidak dengan sendirinya menyebabkan daerah atau subnasionalisme etnis menurun. Sebaliknya, mungkin penyangkalan tersebut mendorong munculnya gerakan separatistis, karena orang semakin meningkatkan permintaan mereka untuk memiliki identitas teritorial kelompok mereka yang dijaga oleh pemerintah mereka sendiri di dalam negara mereka sendiri (Knight, 1982:526). Namun Memorandum of Understanding (MOU) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di provinsi tersebut. Kesepakatan penyelesaian konflik ini diprakarsai oleh organisasi yang berdomisili di Eropa yang disebut Crisi Management Initiative (CMI). Hal yang sangat spektakuler pasca damai adalah warga Aceh seiring dengan berjalan waktu dan sembari melihat sejauh mana keseriusan damai ini, ternyata ada pergeseran rasa dan emosional nasionalisme kepada Indonesia. Artinya rasa etno-nasionalisme separatistis yang lama sudah mulai terkikis dan menuju kepada reintegrasi nasionalisme Indonesia Raya. Faktornya sebagai berikut, dimana perdamaian ini tidak hanya saja menjamin rasa aman di dalam kehidupan sosial masyarakat, namun adanya kepercayaan pusat kepada Aceh untuk menjalankan demokrasi politik di daerahnya. Demokrasi politik lokal ini tertransformasi dalam pembentukan partai politik lokal. Semua masyarakat Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Rasa kepercayaan yang diberikan pusat kepada Aceh sangat membantu tumbuh suburnya rasa nasionalisme yang lebih luas dari rakyat Aceh kepada Indonesia, sekarang Aceh merasakan dan memiliki apa yang diharapkan bung Karno yang perintis bangsa

Indonesia lainnya, yaitu Nasionalisme Indonesia Raya (*Greater Indonesian Nationalism*).

DAFTAR PUSTAKA

Aguswandi. Civil society: the missing peace of peace building. Retrieved from: <http://bib.cfc.dnd.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1H39313W041G4.29427&profile=cfc&uri=link=3100016~!151629~!3100001~!3100002&aspect=subtab46&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=Peace-building+--+Japan.&index=SUBJECT>. Diakses tanggal 23 Maret 2016.

Arifianto, Alexander R. (2008). "Contesting the Nation: Competing Nationalisms in Indonesia" *Paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago, IL* Online <PDF>. 2009-05-23 from http://www.allacademic.com/meta/p268416_index.html. Diakses tanggal 24 Maret 2016.

Ballard, John B. (2008). *Triumph of Self-determination: operation stabilize and United Nations peace making in East Timor*. USA: Praeger Security International.

Brubaker, Rogers and David, D. Laitin. (1998). Ethnic and nationalist violence. Source: Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), pp. 423-452. Published by Annual Reviews. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/223488>.

Bertrand, Jacques. (2002). National Models?, Ethno nationalist Violence and Democratic Consolidation: an analysis of three ethno nationalist movements in Indonesia" *Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Boston Marriott Copley Place, Sheraton Boston & Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts* Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p66407_index.html. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

Bowen, John R. (2005). Normative pluralism in Indonesia: regions, religions, and ethnicity. Retrieved from: <http://artsci.wustl.edu/~anthro/research/bowen/Normative%20Pluralism%20in%20Indonesia.pdf>. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

Bowen, John. (2007). The new anthropology of ethnicity and identity and why it matters for Aceh and Indonesia. First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies. By ARI, BRR. Singapore-Indonesia.

Braisted, William R. (1954). Nationalism in Eastern Asia. Source: The Journal of Modern History, Vol. 26, No. 4 (Dec., 1954), pp. 356-363. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1876112>. Diakses tanggal 27 Maret 2016.

Brown, David. (2001). Why might constructed nationalist and ethnic ideologies come into confrontation with each other? Working paper series No. 17 (Nov., 2001). Southeast Asia Research Centre (SEARC). City University of Hongkong.

Blaskett, Bev. (2006). *Insurgency movements: Indonesia and Aceh*. University of Ballarat.

Retrieved from: <http://uobcommunity.ballarat.edu.au/~bblaskett/index.html/SOCO%202103%20Insurgency/Old%20notes%20Aceh.pdf>. Diakses tanggal 23 April 2016.

Calhoun, Craig. (1993). Nationalism and ethnicity. Source: *Annual Review of Sociology*, Vol. 19 (1993), pp. 211-239. Published by: Annual Reviews. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2083387>. Diakses tanggal 16 April 2016.

Chandra, Siddharth. (1999). Colonial policy, wage inequality, and the birth of nationalism: the case of the Dutch East Indies. Retrieved from: http://eh.net/Clio/Conferences/ASSA/Jan_00/chandra.pdf. Diakses tanggal 20 April 2016.

Drake, Christine. (1992). National integration in China and Indonesia. *Geographical Review*, Vol. 82, No. 3 (Jul., 1992), pp. 295-312. Published by American Geographical Society. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/215353>. Diakses tanggal 12 April 2016.

Egyankosh. Some concepts: Imperialism, nationalism, fascism, Revolution. Retrieved from: <http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/26167/1/Unit2.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2016

Hah, Chong-Do and Jeffrey Martin. (1975). Toward a Synthesis of conflict and integration theories of nationalism. Source: *World Politics*, Vol. 27, No. 3 (Apr., 1975), pp. 361-386. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2010125>. Diakses tanggal 17 April 2016.

He, Baogang and Anthony Reid. (2004). Special issue editor's introduction: four approaches to the Aceh question. *Asian Ethnicity*, Volume 15, Number 3, October 2004. Taylor & Francis Ltd. DOI: 10.1080/1463136042000259752. Retrieved from: <http://www.chinesedemocratization.com/English%20Website/frame/materials/journal/english/HeReid.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2016.

Heywood, Andrew. (2000). *Key concepts in politics*. New York: Palgrave Macmillan.

Heywood, Andrew. (2007). *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.

Hoey, Brian A. (2003). Nationalism in Indonesia: building imagined and intentional communities through transmigration. *Ethnology* Vol. 42, No. 2. Spring 2003, pp. 109-26, c/o Department of Anthropology, The University of Pittsburg, Pittsburg PA 15260 USA. The University of Pittsburg. Retrieved from: http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/39189/2/hoey_ethnology_2003.pdf. Diakses tanggal 17 April 2016.

Hjerm. Mobilizing nationalist sentiments- Which factors affect nationalist sentiments in Europe? Retrieved from: http://www.uaces.org/pdf/papers/0801/2008_Hjerm.pdf. Diakses tanggal 12 April 2016.

Kingsbury, Damien. (2002). Interest, nations, and the state development: inability in archipelagic Southeast Asia. Retrieved from: <http://devnet.anu.edu.au/online%20versions%20pdfs/59/2059Kingsbury.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2016.

Klinken, Geery Van. (2003). Ethnicity in Indonesia. Retrieved from: <http://ssrn.com/abstract=1127126>. Diakses tanggal 19 April 2016.

Knight, David B. (1982). Identity and territory: Geographical perspectives on nationalism and regionalism. Source: *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 72, No. 4 (Dec., 1982), pp. 514-531. Published by: Taylor & Francis, Ltd on behalf of the Association of American Geographers. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2563201>. 19 April 2016.

Kreuzer, Peter. (2004) "Framing Violence. The Role of Culture and State Institutions. Asian Perspectives" *Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada* Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p73554_index.html. 19 April 2016.

Lane, Max. (2002). Indonesia: when 'national unity' is no longer voluntary. Green left weekly. Retrieved from: <http://www.greenleft.org.au/2002/497/28018>. 22 April 2016.

Lanti, Irman G. (2002). How to secure Indonesia's cooperation in fight against militants. Retrieved from: <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/IDSS012002.pdf>. 22 April 2016.

Lawfield, Thomas. (2009). Nationalism in question. Retrieved from: http://www.monitor.uceace.org/innerpg.cfm?id_article=654#_ftn22. 19 April 2016.

Lintner, Bertil. (1999). Giving no quarter. *Far Eastern Economic Review (FEER)*; Jul 29, 1999; 162, 30; ABI/INFORM Global.

Mabry, T. J. (2005). Nationalism and Language in Muslim Minority conflict: A Comparative Study of Language Policy in the Secessionist Politics of Mindanao and Aceh" *Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii* Online <.PDF>. 2009-05-26 from http://www.allacademic.com/meta/p69478_index.html.

Mohammad Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasa Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press.

McIntyre, Angus. (1973). The greater Indonesia' idea of Nationalism in Malaya and Indonesia. *Modern Asian Studies*, Vol. 7, No. 1 (1973), pp. 75-83. Published by

Cambridge University Press. Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/312037.19> April 2016.

Plato. (2001). Nationalism. Retrieved from:<http://plato.Stanford.edu/entries/nationalism>.

Puhovski, Zarko. (2004). The moral basis of political restructuring in Chris Brown (Ed.), political reconstructing in Europe ethical perspective. London: Routledge.

Ramage, Douglas E. (2005). Politics in Indonesia: democracy, Islam and the ideology of tolerance. USA and Canada: Routledge.

Siddique, Sharon and Leo Suryadinata. (1981-1982). Bumiputra and pribumi: economic nationalism (indiginism) in Malaysia and Indonesia. Published by Pacific affairs, University of British Columbia. Vol. 54, No. 4 (1981-1982), pp. 662-687.

Sundararaman, Shankari. Effects of globalization in plural societies: A case study of Indonesia.

Retrieved from:<http://www.asianscholarship.org/asf/ejournal/articles/Shankari%20Sundararaman2.pdf>. Diakses tanggal 27 April 2016.

Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineke Cipta.

Schulze, Kirsten E. (2003). The other side to Aceh's rebel. Retrieved from:http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/EG22Ae05.html. Diakses tanggal 23 April 2016.

Schulze, Kirsten E (2004). The free Aceh movement (GAM): anatomy of a separatist organization. Policy Studies 2. Washington: East West Center.

Smith, Anthony D. (1996). Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism. Source: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 72, No. 3. Ethnicity and International Relations (Jul., 1996), pp. 445-458. Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2625550>. Diakses tanggal 23 April 2016.

Savich, Carl K. Nationalism and War- Nationalism: origins and historical evolution. Source:

www.MakNews.com.<http://www.maknews.com/html/articles/savich/nationalism.pdf>. Diakses tanggal 24 April 2016.

Smith, Dan. (2000). Ethical uncertainties of nationalism. Source: Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 4, Special Issue on Ethnics of War and Peace (Jul., 2000), pp. 489-502. Published by: Sage Publication, Ltd. Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/424643>. Diakses tanggal 23 April 2016.

Smith, Mike. (2009). Understanding nationalism. www.globalpolitician.com.

Spykman, Nicholas J. (1926). The social background of Asiatic nationalism. Source: The American Journal of Sociology, Vol. 32, No. 3 (Nov., 1926), pp. 396-411. Published by: The University of Chicago Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2765541>. Diakses tanggal 12 April 2016.

Tamir, Yael. (1995). Review work(s): Imagined communities by Benedict Anderson. Nationalism: Five roads to modernity by Liah Greenfeld. National identity by Anthony D. Smith. Source : World Politics, Vol. 47, No. 3 (Apr., 1995), pp. 418-440. Published by: The Johns Hopkins University Press.

Thaib, Lukman (2000). Aceh's case: Possible solution to a festering conflict. Journal of Muslim minority affairs. Vol. 20, No. I, 2000. University Kebangsaan Malaysia. Pp. 105-110. Retrieved from: <http://acehnet.tripod.com/thaib.htm>. Diakses tanggal 12 April 2016.

Turner, Mark. (2005). From centralized authoritarianism to decentralized democracy: regional autonomy and the state in Indonesia in Marc Weller and Stefan Wolff (Eds.), autonomy, self-government and conflict resolution: innovative approaches to institutional design in divided societies. New York: Routledge.

Vandenbosch, Amry. (1952). Nationalisma and religion in Indonesia. Source: Far Eastern Survey, Vol. 21, No. 18 (Dec. 17, 1952), pp. 181-185. Published by: Institute of Pacific Relations. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3023866>. Diakses tanggal 19 April 2016.

Wanandi, Jusuf. (2002). Indonesia: a failed state? The Washington Quarterly, summer 2002, pp. 135-146. By The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from: <http://www.twq.com/02summer/wanandi.pdf>. Diakses tanggal 12 April 2016.

Weatherbee, Donald A. (2002). Indonesia: political drift and state decay. Retrieved from: <http://www.watsoninstitute.org/bjwa/archive/9.1/Indonesia/Weatherbee.pdf>. Diakses tanggal 19 April 2016.